

PARTAI POLITIK ISLAM

A. PELEBURAN PARTAI POLITIK ISLAM

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, kerangka struktur politik pemerintah menghendaki penyederhanaan partai. Berdasarkan konsep tersebut, maka pada tahun 1973 seluruh Partai Islam melakukan fusi ke dalam PPP. Hal tersebut memperoleh kekuatan hukum setelah disahkannya UU No. 3/73.¹

gagasan penyederhanaan ini diawali dengan pengelompokan partai dalam parlemen. Pemerintah menyarankan pembentukan berdasarkan dua kelompok.

1. Kelompok Materiil - Spiritual, terdiri atas partai-partai yang menekankan pembangunan materiil tanpa mengabaikan aspek spirituil, terdiri atas PNI, MURBA, IPKI, Partai Katholik dan Parkindo
2. Kelompok Spirituil - Materiil, menekankan pembangunan spirituil tanpa mengabaikan aspek materiil, terdiri atas, NU, Parmusi, PSII dan Perti.²

1. Mulkhan, Op-cit hal. 126

2. Drs. Abd. Aziz Thaba, Op-cit hal. 235

Fusi Partai Politik tersebut mempunyai dua makna:

1. Sebagai akhir sejarah panjang peranan parpol-parpol Islam
2. Sebagai awal persatuan parpol-parpol Islam³

Akhirnya disepakati pendirian partai baru yang merupakan gabungan dari berbagai partai politik Islam saat itu, yakni pada tanggal 5 Januari 1973. Persiapan pendirian inipun terkesan tergesa-gesa, terlihat dari belum terbentuknya struktur organisasi. Baru pada tanggal 13 Pebruari 1973 di Jl. Imam Bonjol 22 tempat kediaman KH. Masykur, berhasilah disusun Program Perjuangan dan Program Pokok PPP. Program perjuangan memiliki 5 Sasara sedangkan Program pokok mencakupi 3 bidang.⁴

Adapun isi dari lima sasaran program tersebut antara lain :

1. Membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan mengusahakan terwujudnya aklakul karimah dengan mempertinggi rasa kesadaran dan rasa tanggung jawab beragama dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

3. Ibid hal. 235

4. Nasir Tamara, Op-cit hal. 47

Selanjutnya dicantumkan pula 3 program pokok PPP yang isinya antara lain :

1. Peningkatan stabilitas politik untuk mengembangkan demokrasi Pancasila, memperkuat konstitusional dan meningkatkan tegaknya hukum.
2. Meningkatkan perkembangan kreatifitas masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pembangunan nasional.
3. Meningkatkan ketahanan nasional disegala bidang.⁵

Deklarasi berdirinya PPP diumumkan oleh presidium kelompok PPP yang ditanda tangani oleh KH. Idham Chalid, HMS. Mintaredja SH, H. Anwar Tjokroaminoto, Rusli Halil, dan KH. Masykur. Terpilih sebagai presidium partai Idham Chalid, sedangkan Ketua Umum pimpinan pusat ialah Mintaredja, SH.

Para pendiri PPP sebagai satu-satunya partai Islam di Indonesia amat bergairah dan optimis tentang masa depan PPP, setelah sedih melihat hasil yang dicapai partai-partai Islam pada pemilu sebelumnya. Walaupun, proses penyaluran aspirasi ini sering terjadi konflik antara unsur-unsur yang ada dalam PPP khususnya antara Nahdlatul Ulama dan Parmusi.

Kesamaan identitas (Islam) dari parpol Islam, bukanlah satu jaminan adanya satu kerjasama ataupun satu

persepsi dalam tubuh partai politik PPP. Hal ini disebabkan, masing-masing partai Islam yang telah melebur tersebut akan memperjuangkan kelompoknya untuk memperoleh jumlah suara yang besar, sehingga dapat menempatkan wakil-wakilnya yang duduk di legislatif lebih banyak.

Nampaknya, terjadinya fusi partai-partai Islam dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ada yang memandang sebagai suatu kemudahan bagi kelompok lain untuk mengontrol partai tersebut, tetapi ada juga yang menganggap sebagai suatu ancaman. Berikut ada beberapa pandangan dari berbagai kalangan yang mencoba menyikapi adanya peleburan partai Islam.

Di tubuh Militer, ada tiga kelompok yang memandang secara berbeda mengenai fusi. Kelompok pertama, menyarankan kepada pemerintah agar partai-partai Islam jangan disatukan dalam satu partai, karena dikuatirkan pada suatu hari akan balik memukul dan akan menjadi ancaman bagi kekuatan ABRI. Untuk itu supaya dibiarkan partai-partai Islam terbagiseperti sebelum fusi. Paling jauh mereka disatukan dalam satu federasi yang longgar. Dengan demikian kekuatan Islam tidak akan menjadi kekuatan yang berarti dan akan tetap lemah.

Sementara, pendapat kedua, memandang sebaliknya.

Sebaiknya partai Islam disatukan dalam satu wadah, difusikan dalam satu pengelompokan. Dengan berfusnya partai-partai Islam, maka kekuatan Islam akan lebih mudah dikontrol dan dikuasai. Kelompok ketiga berpendapat bahwa, partai-partai Islam diberi tempat yang wajar saja. Dibiarkan berkembang secara alami tetapi diberikan pengarahan untuk mewujudkan persatuan. Kelompok berpendapat justru kekuatan Islam harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam pembangunan.

Terlepas dari berbagai pandangan dan tanggapan masyarakat luas, adanya peleburan partai-partai Islam justru menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara NU dan Parmusi (MI) sebagaimana yang telah saya singgung diawal. Konflik berkepanjangan tersebut berawal dari pembagian jatah kursi kepengurusan bagi wakil-wakilnya dilegislatif. Nahdlatul Ulama yang merupakan partai terbesar Islam sebelum fusi, sudah seharusnya mendapat jatah paling besar dibanding Partai Islam yang lain. Ini tentu logis, sebab didukung oleh suara massa yang besar pula.

Sementara Parmusi (MI) menempatkan kelompoknya sebagai penerus partai Parmusi, maka sudah sewajarnya jika Parmusi menentukan keberadaan PPP. Selain itu, Parmusi juga didukung kedekatan para fungsionarisnya

dengan pemerintah. Justru dengan kedekatan inilah, muatan-muatan PPP akan lebih berarti pada saat-saat pengambilan keputusan.

Jelasnya baik Nahdlatul Ulama maupun Parmusi (MI) merupakan unsur yang paling dominan dalam PPP. NU memiliki basis massa tetapi pemimpinnya kurang memiliki keunggulan intelektualitas. Sebaliknya, Muslimin Indonesia memiliki kualitas intelektual tinggi, tetapi memiliki kemampuan lobyng dengan pemerintah.⁶

B. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAN ASPIRASI UMAT ISLAM

Umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia memiliki potensi untuk menyukseskan pembangunan nasional, sebagai sumber legitimasi sistem politik dan sumber dukungan dalam setiap pemilu. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan peleburan partai-partai Islam, sudah sewajarnya merangkul potensi tersebut dan berusaha untuk tidak melepaskannya. Secara historis, PPP tidak terlepas dari umat Islam Indonesia yang menjadi mayoritas rakyatnya. Ikatan Historis ini, tidaklah mudah untuk dilepaskan, sekalipun sudah ada ide untuk melepaskannya dan memperluas basis partai itu kepada

6. Thaba, Op-cit hal. 238

1. Ia telah memberikan landasan identifikasi diri bagi PPP
2. Ia telah pula berfungsi sebagai thema sentral perjuangan PPP
3. Dalam masa pemilu ia bukan saja berfungsi sebagai pengikat massa secara keagamaan, tetapi telah juga menjadi alat untuk memberikan legitimasi keagamaan bagi kemenangan PPP.

Kemudian, apa peran PPP terhadap umat Islam yang merupakan basis terbesar dari PPP ? sebab ketika sudah mengklaim dirinya sebagai partai Islam, tentu sudah sewajarnya dapat menjadi wadah sekaligus penyalur aspirasi pendukungnya.

Memasuki usianya yang kelima, PPP dihadapkan pada SU MPR 1978. Dalam sidang umum MPR 1978 tersebut, terdapat perdebatan yang sangat alot, khususnya di komisi B yang membahas tentang P-4, dimana didalamnya

7. Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi,
Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1997 hal. 25

1. Menggantikan pelajaran agama dengan Pendidikan Moral Pancasila dalam semua tingkatan sekolah umum
2. Anggaran belanja negara 1973/1974 untuk urusan-urusan keagamaan diturunkan dari 1.226 Juta menjadi 800 juta.
3. Persoalan masuknya aliran Kepercayaan dalam GBHN sebagai bagian dari "Agama resmi" yang kedudukannya setingkat dengan agama lainnya : Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha⁸

8. Thaba, Op-cit hal. 253

Usaha pemerintah untuk meredakan konflik ini adalah dengan mengganti kata kebathinan dengan Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya FPP menerima aliran kepercayaan dalam GBHN dengan catatan, sebagaimana pandangan umum fraksi-fraksi pada sidang pleno, bahwa :

"Sekalipun FPP berpendapat bahwa rumusan tersebut belum memadai baik bobot, derajat, maupun kualitasnya... namun rumusan tersebut adalah hasil konsensus yang benar-benar merupakan hasil musyawarah"¹⁰

FPP tidak mendukung penyebaran dan pengembangan aliran kepercayaan dan mengimbau kepada seluruh penghayatnya untuk kembali kepada ajaran agamanya masing-masing :

"Diusahakan bimbingan dan pengawasan pertumbuhan aliran-aliran kepercayaan/paham-paham keagamaan supaya dapat kembali kepada induk agama masing-masing dan berusaha mencegah perkembangan aliran-

9. Ibid hal. 255

10. Ibid hal. 255

Pada SU MPR itulah muncul pengertian PPP sebagai The Loyal Opposition yaitu bersikap oposisi tetapi tidak bermaksud menjadi alternatif pemerintah. Menteri agama RI Alamsyah sendiri mencatat pelbagai situasi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan keagamaan di Indonesia menjelang SU MPR 1978, yaitu adanya "Suasana saling mencurigai antara sesama pemeluk agama; golongan non-Islam mengkuatirkan bahwa dasar negara Pancasila akan diubah, sedangkan golongan Islam mengkuatirkan bahwa anak keturunannya akan memeluk agama lain." Dia juga mencatat "adanya kecurigaan pihak pemerintah terhadap pemimpin-pemimpin Islam, karena kritik-kritik mereka yang tajam terhadap kebijaksanaan pemerintah, demikian juga image yang masih belum hilang terhadap DI/TII.¹²

Fenomena menarik lagi di tahun 1982 yakni tampilnya sosok yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah yakni J. Naro. Beliau dengan berbagai usaha kemudian dapat menduduki jabatan Ketua Umum PPP. Tampaknya Naro mengemban tugas khusus untuk membersihkan

11. Ibid hal. 255

12. Nasir Tamara, Op-cit hal. 48

Akibatnya, luka lama yang belum sembuh justru diperparah oleh masalah klasik, yaitu pembagian jatah kursi yang tidak sesuai dengan proporsinya masing-masing. Konflik yang berkepanjangan ini, menyebabkan Idham Chalid mengancam akan mengundurkan diri bila konflik intern tersebut tidak diselesaikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh KH. Syaifuddin Zuhri ketua DPP-PPP tanggal 19 November 1981 silam.

Hambatan yang dialami pada pemilu 1977, masih terasa dalam kampanye PPP (1982), seperti seretnya perijinan disementara daerah, gangguan keamanan sampai penahanan oleh sementara oknum pejabat daerah yang over acting.¹³

Gagasan untuk menyeragamkan azas kekuatan politik

abilitas politik yaitu dengan
ng terdapat dalam kedua part
a, seperti PPP dengan "Islam"
an "Demokrasi Indonesia,
eadilan Sosial ..."¹⁴
ari sasaran pemerintah diatas
itik - tidak terkecuali k
engan kebijakan yang ditera
an, banyak organisasi kemasya
a partai politik yang diha
diologi yang menjadi ciri da
engan idiologi atas rekayasa
pemerintah tersebut didas

abilitas politik yaitu dengan
ng terdapat dalam kedua part
a, seperti PPP dengan "Islam"
an "Demokrasi Indonesia,
eadilan Sosial ..."¹⁴
ari sasaran pemerintah diatas
itik - tidak terkecuali k
engan kebijakan yang ditera
an, banyak organisasi kemasya
a partai politik yang diha
diologi yang menjadi ciri da
engan idiologi atas rekayasa
pemerintah tersebut didas

abilitas politik yaitu dengan
ng terdapat dalam kedua part
a, seperti PPP dengan "Islam"
an "Demokrasi Indonesia,
eadilan Sosial ..."¹⁴
ari sasaran pemerintah diatas
itik - tidak terkecuali k
engan kebijakan yang ditera
an, banyak organisasi kemasya
a partai politik yang diha
diologi yang menjadi ciri da
engan idiologi atas rekayasa
pemerintah tersebut didas

abilitas politik yaitu dengan
ng terdapat dalam kedua part
a, seperti PPP dengan "Islam"
an "Demokrasi Indonesia,
eadilan Sosial ..."14
ari sasaran pemerintah diatas
itik - tidak terkecuali k
engan kebijakan yang ditera
an, banyak organisasi kemasya
a partai politik yang diha
diologi yang menjadi ciri da
engan idiologi atas rekayasa
pemerintah tersebut didas

abilitas politik yaitu dengan
ng terdapat dalam kedua part
a, seperti PPP dengan "Islam"
an "Demokrasi Indonesia,
eadilan Sosial ..."¹⁴
ari sasaran pemerintah diatas
itik - tidak terkecuali k
engan kebijakan yang ditera
an, banyak organisasi kemasya
a partai politik yang diha
diologi yang menjadi ciri da
engan idiologi atas rekayasa
pemerintah tersebut didas

berbagai ragam pendapat. Sebagian menaruh harapan atas penyeragaman azas tunggal tersebut, sebab dengan adanya kesamaan azas, sedikit banyak akan mengurangi kotomi atau pengkotak-kotakan ditengah masyarakat, yang pada akhirnya tidak mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan. Argumen seperti ini didasarkan pada pengalaman masa lampau, dimana terdapat banyak partai atau wadah yang tentunya akan banyak pula menimbulkan konflik yang tidak berkesudahan. Sebagian yang lain berpendapat, justru dengan adanya penyeragaman asas ini, berarti mengingkari keberagaman yang ada dalam masyarakat.

Perubahan yang besar setelah SU MPR 1983 tersebut, memaksa PPP, mau tidak mau, dan dengan segala konsekuensinya harus menerima Pancasila sebagai idiologi barunya. Azas ini diberlakukan setelah muktamar PPP Agustus 1984 Azas PPP menjadi Pancasila sesuai dengan Tap MPR. Kemudian DPR membuat UU perubahan pemilu tentang penggunaan tanda-tanda gambar baru yang mencerminkan Pancasila. Akhirnya tanda gambar Ka'bah bagi PPP diganti dengan Bintang.

Dengan penggantian gambar atau simbol PPP tersebut, terjadilah apa yang disebut "Deskralisasi Partai Politik". Ini berarti, secara formal tidak ada lagi partai politik yang dapat mengklaim dirinya sebagai

Dalam muktamar PPP diatas, juga disinggung tentang penegasan asas tunggal. Tujuan dari muktamar ini

terhadap pembangunan tujuannya

etapi, sejak pemerintah dengan

ntang keharusan menggunakan as

orpol, berpengaruh besar bagi

emakin berkurangnya perolehan

Tampil tanpa orang-orang yang

dan terputusnya hubungan tradi

mat, jumlah suara yang diperole

suara. Kalau pada pemilu sebel

971, 1977, 1982 PPP menggunakan

etapi, sejak pemerintah dengan
tantang keharusan menggunakan as
orpol, berpengaruh besar bagi
semakin berkurangnya perolehan
Tampil tanpa orang-orang yang
dan terputusnya hubungan tradi
mat, jumlah suara yang diperole
suara. Kalau pada pemilu sebel
1971, 1977, 1982 PPP mengguna

mobilisasi massa, akan tetapi k
 uk mengangkat thema kampanye
 perolehan suara yang menurun.
 gi fenomena yang menarik adalah
 r PPP setelah dalam muktamar
 gambil kebijakan untuk kembali
 secara organisatoris NU tid
 atu parpol manapun. Sementara i

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NU yang merasa dirugikan oleh Naro melakukan aksi pengembosan terhadap PPP dalam pemilu 1987 sehingga perolehan suaranya menurun.¹⁷ Selain itu warga NU dipengaruhi oleh rasa kekecewaan pada Naro dalam pemberian jabatan pengurus dan jatah kursi di legislatif.

Menurunnya suara yang diperoleh PPP juga dipengaruhi oleh UU no. 1 tahun 1985 pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam kampanye pemilu dilarang mempersoalkan Pancasila dan UUD '45. Tema kampanye pemilu adalah program tiap-tiap organisasi peserta pemilu (OPP) yang berhubungan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kampanye harus ditekankan pada program kerja organisasi peserta pemilu, bukan pada orientasi ideologi. Peraturan pemerintah tersebut disatu sangat baik bagi pendidikan politik rakyat sekaligus mencoba mencari bentuk kampanye yang mampu menarik simpati rakyat. Disatu sisi tidak menguntungkan bagi OPP khususnya PPP, sebab merasa kesulitan mengangkat isu kampanye.

Hal inilah yang memberatkan PPP, manakala Agama (Islam) tersebut semakin dijauhkan dari panggung

17. Thaba, Op-cit hal. 217

politik. Dengan semakin kecilnya pengaruh agama dalam politik - yang berarti semakin terkucilnya umat Islam dalam PPP, maka dilihat dari usaha partai untuk melakukan kegiatan dalam rangka mengikut sertakan masyarakat dalam berpolitik, jelas PPP akan mengalami kesulitan dalam menarik masanya, jika agama harus dilepaskan sama sekali dari politik, mengingat sampai saat ini hanya tinggal agama, Islam saja yang dapat dijadikan pegikat solidaritas umat Islam, sebagai akibat dari ketiadaan kegiatan partai di dalam masyarakat.¹⁸ Dalam hubungan dengan penyeragaman asas ini PPP-lah yang langsung merasakan akibatnya. Dan dengan demikian pada perkembangan berikutnya tak mustahil jika PPP pun akan semakin terasing dari umat Islam.¹⁹

Dan semenjak saat itu terjadi heterogenitas atau diversifikasi partisipasi dikalangan umat Islam dalam rangka menyalurkan aspirasi politik , karena umat tidak mempunyai partai yang menjadi identitas tersendiri dan yang sesuai dengan aspirasi pendukungnya.

18. Abd. Munir Mulkhan, Op-cit hal. 258

19. Ibid hal. 258